

## **Proses Komunikasi dan Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Karangtengah Sukabumi**

**Sri Siswanti<sup>1</sup>, Ellya Pratiwi<sup>2</sup>, Ce Gunawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Institut Manajemen Wiyata Indonesia  
Sukabumi, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>tyaswan@gmail.com, <sup>2</sup>pratiwiellya@gmail.com <sup>3</sup>cegunawan@imwi.ac.id

### **ABSTRAKSI**

Digitalisasi dalam segala aspek kehidupan merupakan hal yang tidak bisa ditolak. Digitalisasi juga merambah ke ranah media. Media digital hadir dalam berbagai bentuk dan karakter. Hal tersebut merubah pola interaksi masyarakat dan media terkait dengan penyampaian dan penerimaan informasi. Informasi di era digital tidak lagi dicari namun mencari audience nya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya banjir informasi. Terkait dengan itu dibutuhkan kemampuan masyarakat untuk mengakses, memilah dan memilih informasi serta kemampuan untuk memahami konteks dalam teks akan membantu masyarakat mengambil manfaat dari beragam informasi yang ada di media digital, bukan sebaliknya. Penelitian ini berupaya mengulas dampak media digital di era post-truth dan upaya antisipasinya. Literasi digital dan literasi media sangat diperlukan di era banjir informasi ini.

Keyword: *Peran komunikasi, PKH, implementasi kebijakan*

### **ABSTRACT**

*Digitalization in all aspects of life is something that cannot be denied. Digitization has also penetrated the realm of the media. Digital media comes in various forms and characters. This changes the pattern of interaction between the community and the media regarding the delivery and receipt of information. Information in the digital era is no longer sought after but is looking for its audience. This results in a flood of information. Related to that, it takes the community's ability to access, sort and select information and the ability to understand the context in the text will help people take advantage of the various information available in digital media, not the other way around. This study seeks to review the impact of digital media in the post-truth era and its anticipation efforts. Digital literacy and media literacy are needed in this information flood era.*

Keywords: *The role of communication, PKH, policy implementation*

### **PENDAHULUAN**

Dalam proses pelaksanaan beberapa program yang dijalankan pemerintah, diperlukan dukungan dari masyarakat setempat. Program maupun kebijakan yang diberlakukan pada suatu daerah harus dikomunikasikan dengan baik. Sehingga, proses pelaksanaan program dapat berjalan lancar. Program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama bagi ibu hamil dan anak agar dapat memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan PKH juga diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang menggabungkan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilaksanakan secara sistematis. Tentunya pengentasan kemiskinan juga dilakukan dalam rangka

meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Program PKH dimaksudkan untuk mengupayakan pembangunan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. PKH juga diketahui penting untuk dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pembangunan.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam Pelaksanaan SDM PKH di tingkat daerah Kabupaten/Kota, terjadi kesalahpahaman antara kinerja bagi pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data. Sehingga koordinasi tidak berjalan dengan baik antar SDM yang bergerak dalam pelaksanaan program PKH. Ketika koordinasi belum terlaksana dengan baik, maka permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan PKH tidak dapat dihindari.

Permasalahan kedua adalah penyaluran beberapa dana PKH masih diberikan kepada keluarga yang dikategorikan sebagai masyarakat tidak miskin. Hal ini digambarkan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang dilayangkan kepada Dinas Sosial Kota Sukabumi berkaitan dengan anggaran PKH tidak tepat sasaran yang berdampak pada tidak meratanya bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Melihat adanya fenomena tersebut, diperlukan adanya bentuk

pemberdayaan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan melihat karakteristik rumah tangga. Hal tersebut perlu dipertimbangkan karena dalam setiap rumah tangga pasti memiliki ciri-ciri dan kebutuhan yang berbeda. Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian tentang Proses Komunikasi dan Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Karangtengah Sukabumi.

Adapun penelitian terdahulu penelitian Slamet Agus Purwanto, Sumartono, M. Makmur (2013) Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). Melalui hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari ini sudah berjalan dengan cukup baik. Terlihat dari tahapan proses pelaksanaan dari program tersebut yang telah berjalan lancar. Sedangkan dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut, penggunaannya sudah tepat. Sedangkan menurut penelitian Amir Syarifudin Kiwang (2018) penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Kupang. Hasil penelitian tersebut menggambarkan kondisi Kota Kupang yang sampai dengan tahun 2018 tercatat ada sekitar 6.019 KK penerima, pelaksanaan PKH pada Kota Kupang memiliki kendala, yakni persoalan komunikasi lintas sektoral dan struktur birokrasi dalam proses pelaksanaan PKH sehingga sering menimbulkan persoalan dilapangan. Selain itu, peserta PKH yang tidak melaksanakan komitmen sesuai dengan hasil verifikasi akan mendapat sanksi berupa potongan jumlah bantuan pada tahun berjalan. Kerjasama operator dan pendamping serta semua *stake holder* menjadi kunci bagi suksesnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kupang.

## METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan penelitian dalam pendekatan kualitatif (Suharsimi Arikunto, 2013: 56). Dengan menggunakan metode deskriptif (Wina Sanjaya, 2013: 47). Metode kualitatif adalah data yang berupa kalimat atau pernyataan bukan berupa angka. Penelitian ini menempuh beberapa tahapan, mulai dari Wawancara, pencarian data di lapangan, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Proses Komunikasi dan Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Karangtengah Sukabumi. Subjek dalam penelitian ini adalah bapak lurah (kelurahan karangtengah) dan SVA selaku pendamping PKH. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara tak terstruktur. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Komunikasi

Harold Lasswell menyebutkan bahwa komunikasi memiliki lima unsur yang saling bergantung satu sama lain. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah sumber (*source*),

pengirim (*sender*), penyandi (*encoder*), komunikator dan pembicara (Suprpto: 2009).

Kamarudin menyampaikan fungsi komunikasi diantaranya adalah sebagai berikut : Dapat menyampaikan pikiran maupun perasaan, tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan, dapat mengajarkan atau memberitahukan mengenai sesuatu, dapat mengetahui ataupun mempelajari sesuatu dari peristiwa yang terjadi di lingkungan, dapat mengenal diri sendiri, dapat memperoleh hiburan atau menghibur orang lain, dapat mengurangi maupun menghilangkan perasaan tegang, mengisi waktu luang, menambah pengetahuan, merubah sikap maupun perilaku, serta kebiasaan, membujuk atau memaksa orang lain agar berpendapat, bersikap, atau berperilaku (Hasan: 2016).

Komunikasi merupakan proses untuk memecahkan masalah dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, komunikasi pun dinilai memiliki peranan penting dalam perubahan sosial. Adapun faktor pendukung yang dapat mendorong proses komunikasi tersebut menjadi efektif diantaranya: Kesesuaian pesan yang disampaikan sehingga minim terjadinya distorsi, adanya feedback langsung, evaluasi pesan, media pengantar, yaitu bagian dari proses komunikasi yang sedang berlangsung. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sosiologis dan psikologis.

### 4.2 Komunikasi Sosial dan Pembangunan

Komunikasi sosial pembangunan ada beberapa tingkatan. Misalnya, dari seorang petani hingga pejabat pemerintahan Negara dan termasuk didalamnya proses musyawarah dan pembicaraan kelompok dalam ranah yang resmi, dan lain-lain. Dengan kata lain, komunikasi pembangunan merupakan inovasi yang diterima masyarakat melalui proses komunikasi.

Wilbur Schramm dan Rahma Muchri menjelaskan bahwa komunikasi memiliki tugas pokok dalam pembangunan nasional, yakni: Menyampaikan kepada informasi tentang pembangunan sosial kepada masyarakat, memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan, dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan. Sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah. Dalam hal ini komunikasi berfungsi untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan.

Adapun tujuan komunikasi pembangunan berperan sebagai pemberian inspirasi, perilaku intelektual, serta menanamkan kemampuan yang diperlukan untuk membangun sebuah bangsa yang sejahtera. Komunikasi pembangunan merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan sebagai konsep pembangunan negara.

Prinsip dalam komunikasi pembangunan diartikan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan dan harus mempertimbangkan penekanan sebelumnya untuk menghindari kemungkinan adanya hal yang tidak diinginkan.

### 4.3 Peranan Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Pelaksanaan PKH di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi

Komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan dalam sebuah organisasi diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik, sehingga dapat menimbulkan komunikasi yang efektif dalam sebuah pelaksanaan program, Program PKH yang dijalankan di Kelurahan Karangtengah menerapkan alur komunikasi vertikal. Data-data calon KPM yang diperoleh dari ketua kelompok peserta PKH atau PSM Kelurahan Karangtengah, selanjutnya disurvei oleh Pendamping PKH. Apabila telah memenuhi kriteria, data tersebut diberikan kepada operator atau APD (Administrator Pangkalan Data) untuk disampaikan kepada Koordinator Kota Sukabumi dengan nota Dinas Sosial Kota Sukabumi. Selanjutnya, data tersebut dikirimkan langsung ke Kementerian Sosial RI untuk pemutakhiran (pembaharuan) data peserta PKH.

Hasil wawancara bersama Lurah Karangtengah menuturkan *“Belum adanya kesadaran dari peserta PKH dalam mendukung program PKH di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi untuk memastikan bantuan tepat sasaran seperti identitas peserta PKH pada waktu penyaluran bantuan, ada yang lupa untuk membawa KTP atau KK ke tempat penyaluran bantuan, Kurangnya SDM pendamping PKH dalam menjalankan pendampingan peserta PKH di Kelurahan Karangtengah, Terkadang kurang kerjasama antara peserta PKH dengan pendamping dalam menyampaikan informasi perubahan data peserta PKH ke pendamping, dan Kurang Kerjasama antara pendamping PKH dan pemerintah setempat dalam hal ini pihak Kelurahan Karangtengah dalam pendataan peserta PKH”*

Hasil dari pemaparan tersebut diartikan bahwa setiap unsur berpengaruh terhadap pelaksanaan PKH ini, lurah Karangtengah ini telah melakukan upaya untuk meminimalisir kendala tersebut dengan cara strategi komunikasi persuasif (menyampaikan pesan melalui tatap langsung atau melalui grup *WhatsApp* yang sudah terbentuk.

Untuk memperkaya data pada penelitian ini, peneliti pun memilih ES, selaku informan ahli kedua yaitu Kasi Kesos Karangtengah menuturkan *“Persyaratan penerima bansos PKH meliputi anak usia sekolah (usia dini dan SD-SMA), ibu hamil, lanjut usia atau lansia, dan penyandang disabilitas. Masing-masing penerima Bansos PKH sesuai kriteria tersebut menerima nominal bantuan yang berbeda pula dan mereka terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”* dan ES kasi kesos ini juga mengatakan bahwa PKH merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pernyataan ES tersebut sesuai dengan tujuan penyelenggaraan PKH oleh Kemensos yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ES, dapat diartikan bahwa idealnya, PKH dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal kesejahteraan sosial. Misalnya, kemudahan dalam mengakses berbagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan di daerah tersebut.<sup>1</sup> Namun, hambatan yang ditemukan oleh ES juga mengakibatkan pelaksanaan PKH di kelurahan Karangtengah terkendala. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan informan ahli pertama (HP), yang menyebutkan bahwa komunikasi dan kerjasama merupakan kendala dalam pelaksanaan program. Adanya miskomunikasi membuat ES kesulitan dalam menangani komplain yang dilyangkan oleh warga, yang datanya terhapus dari DTKS.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh ES ternyata cukup berbeda dengan HP (Informan ahli 1). HP memaksimalkan penggunaan teknologi untuk melakukan pendekatan kepada setiap *stakeholder* pada PKH di Kelurahan Karangtengah, namun ES memilih untuk bertatap muka jika diperlukan.

### 4.4 Kesesuaian Peran dari Pendamping PKH dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya pada Pelaksanaan Program PKH di Kelurahan Karangtengah

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian peran Pendamping PKH dalam menjalankan tugas dan fungsinya, peneliti memilih seorang informan kunci. SVA merupakan satu-satunya Pendamping PKH Kelurahan Karangtengah. Ia telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan PKH selama kurang lebih 4 tahun.

Adapun dalam menjalankan tugasnya selaku Pendamping PKH, SVA menyebutkan bahwa ia melakukan strategi komunikasi sebagai salah satu langkah mengenali KPM. Menurutnya, fokus kepada KPM merupakan sasaran untuk mencapai tujuan PKH. Oleh karena itu, SVA melakukan berbagai kegiatan dan upaya lainnya, yang memungkinkan dirinya untuk bisa mengenali dan memahami KPM. SVA menilai bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mengenali KPM. Selain itu, SVA juga menyampaikan bahwa Pendamping PKH perlu memahami kerangka referensi dan situasi kondisi. Sehingga, pendamping dapat memilah-milah KPM berdasarkan cara berpikirnya, dan melakukan penyesuaian

SVA menilai bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dilakukan oleh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan kendala yang ia temukan adalah kendala dalam berkomunikasi. SVA menyampaikan bahwa kurangnya kerjasama antara Ketua KPM dengan Pendamping pada saat melakukan pendampingan membuatnya sulit dalam melaksanakan tugasnya. Terlebih, jika KPM terlambat datang ketika kegiatan pendampingan karena tidak memiliki alat komunikasi, sehingga informasi untuk kegiatan pendampingan tersebut tidak tersampaikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, SVA selaku Pendamping PKH Kelurahan Karangtengah tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal apabila ada

kendala-kendala yang bersumber dari kurangnya efektivitas komunikasi diantara dia dan KPM. Hal tersebut menggambarkan, komunikasi memiliki peran penting yang dapat memengaruhi pelaksanaan pendampingan KPM di Kelurahan Karangtengah. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ardianto, bahwa partisipasi aktif dari setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan sebuah program dapat mewujudkan tujuan jangka panjang dari sebuah program pembangunan.

Mengingat kendala yang disampaikan oleh SVA saat menjelaskan upaya pendampingan pun terpengaruh oleh efektivitas komunikasi, membuktikan bahwa proses komunikasi efektif menjadi faktor penting dalam pelaksanaan PKH. Hal ini sesuai dengan temuan pada poin pertama yakni peranan komunikasi dalam implementasi kebijakan PKH. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui strategi komunikasi pendamping PKH, berkaitan dengan media apa yang digunakan dalam proses pendampingan tersebut.

SVA memberikan keterangan, bahwa media yang digunakan olehnya yaitu aplikasi perpesanan dan tatap muka. Adapun SVA berpendapat bahwa media yang paling efektif diantaranya adalah tatap muka. Namun mempertimbangan kondisi pandemi saat ini, SVA tetap berkoordinasi dengan KPM melalui Whatsapp Group. Proses pendampingan dilakukan dengan menerima dan memahami keluhan serta aspirasi dari KPM mengenai pelaksanaan PKH di lapangan. Sebagai salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan PKH, komunikasi yang baik perlu dilakukan. Dengan mempertimbangkan secara matang pendekatan komunikasi yang diterapkan, memungkinkan proses pelaksanaan program dapat lebih baik. SVA menyampaikan, pendekatan komunikasi yang dipilih dan dijalankan olehnya adalah komunikasi persuasif. Hal ini bertujuan agar KPM dapat mencerna dengan baik pendampingan yang dilakukan. Mengingat, latar belakang pendidikan para KPM.

Selain memaksimalkan FDS, SVA memberikan gambaran proses pendampingan yakni dengan pemilihan bahasa sebagai salah satu strategi agar pesan-pesan pendampingan mudah dicerna oleh KPM. Tentunya tujuan pendampingan pada program PKH bukan semata-mata untuk mengurangi tingkat kemiskinan, melainkan untuk mencerdaskan KPM. Hal ini sesuai dengan tujuan komunikasi pembangunan, yakni mengajar masyarakat. Proses tersebut dilakukan agar KPM dapat mengubah sikapnya ke arah yang lebih baik.

Dari pernyataan SVA diatas, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH senantiasa melakukan pendekatan kekeluargaan. Misalnya, melakukan kunjungan dan memperhatikan kondisi KPM. Tentunya dalam pelaksanaan pendampingan dengan cara kekeluargaan, akan meningkatkan kepercayaan KPM kepada pendamping. Oleh karena itu, KPM pun dapat memberikan respon yang sangat baik.

#### **4.5 Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Program PKH di Kelurahan Karangtengah Kota Sukabumi**

Gambaran mengenai implementasi kebijakan pemerintah di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh, peneliti memilih informan pendukung yang memiliki peran dalam pelaksanaan PKH, yakni KPM. Selama pelaksanaan program PKH, NN merasa terbantu dalam melangsungkan pendidikan anak-anaknya. Sesuai dengan tujuan PKH itu sendiri, yakni mensejahterakan KPM baik dalam hal pendidikan dan pelayanan masyarakat.

Untuk mendapatkan manfaat PKH, KPM tentunya harus memahami berbagai pesan yang disampaikan oleh pendamping PKH. Namun, dalam mencerna pesan tersebut terkadang KPM memiliki hambatan. NN selaku Ketua KPM Kelurahan Karangtengah menyampaikan, bahwa dirinya selalu menghubungi pendamping PKH untuk menanyakan hal yang tidak ia pahami. Sedangkan Proses penyampaian kembali pesan yang disampaikan oleh pendamping tidak selalu berjalan lancar. NN pun biasa menemukan hambatan ketika proses pencairan dan pendamping PKH yang susah dihubungi. NN pun tidak enggan melakukan pertemuan tatap muka dengan pendamping, dikarenakan kondisi pandemi saat ini.

Dari keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa kendala lainnya yang ditemukan KPM adalah pemberitahuan mendadak dari pendamping. Hal tersebut membuat NN selaku Ketua Kelompok KPM menjadi terburu-buru dalam menyampaikan kembali informasi kepada anggotanya. Untuk meminimalisir kendala dalam menyampaikan informasi tersebut, NN menggunakan media pendukung yakni aplikasi perpesanan.

Salah satu faktor yang mendukung kelancaran proses komunikasi yang dilakukan oleh pendamping kepada KPM adalah kepercayaan. Dalam hal ini, KPM percaya terhadap Pendamping, dikarenakan dapat menjalankan perannya dengan baik. Selain itu, empati yang diberikan oleh pendamping juga mendukung proses pelaksanaan pendampingan, sehingga KPM dapat melaksanakan perannya sesuai prosedur.

#### **KESIMPULAN**

Komunikasi yang digunakan di dalam penerapan pada pendamping pelaksanaan PKH di kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dengan komunikasi secara langsung dan *WhatsApp Group*. Terbukti dari keterangan masing-masing informan, yang menyampaikan adanya kendala dalam pelaksanaan program, namun sebagiannya dapat teratasi karena penerapan strategi komunikasi yang baik.

Pendamping PKH telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dalam melakukan pendampingan kepada KPM. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama SVA selaku Pendamping PKH Kelurahan Karangtengah, yang menggambarkan proses pendampingan menemukan kendala-kendala. Namun, ia senantiasa melakukan berbagai pendekatan agar KPM mengerti tujuan dalam pelaksanaan PKH. Ia juga

mengupayakan agar berbagai materi yang disampaikan kepada KPM dapat diterima dengan baik, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian.

KPM menyampaikan gambaran yang baik terhadap pelaksanaan program PKH di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat informan-informan pendukung yang menyampaikan bahwa pendamping telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Misalnya dengan memberikan informasi yang benar dan melakukan pendekatan kekeluargaan. Namun, terkadang pesan yang disampaikan oleh pendamping terlalu mendadak sehingga menimbulkan kendala bagi KPM.

## REFERENSI

- Ardianto, Elvinaro dan Rochajat Harun. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, 1989 dalam Bilal Syahid (01 November 2019). *Data-pengertian, jenis, sifat, sumber, pengumpulan, pengukuran, sumber, para ahli*. Retrieved Maret 25, 2020, from gurupendidikan.co.id: <https://www.gurupendidikan.co.id/data/>
- Cahya Dicky Pratama. (2020). *Good Governance: Definisi dan Prinsipnya*. Jakarta: Kompas.com <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/18/174244269/good-governance-definisi-dan-prinsipnya> (diakses pada tanggal 29 Juni 2021)
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cigna Corporation. Hasil Survey Kesejahteraan 360° Tahun 2019: Masyarakat Indonesia Semakin Sejahtera. 2019. Jakarta: Cigna Corporation. (<https://www.cigna.co.id/berita/hasil-survei-kesejahteraan-360-tahun-2019>) diakses pada tanggal 25 Juni 2021.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 162
- Dr Sutopo MS. (2016). *Peranan Komunikasi Terhadap Difusi-Adopsi Inovasi Dalam Pencegahan Konflik Antarbudaya*. Surakarta: Univeritas Sebelas Maret.
- Efendy, Onong Uchana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Endang Sumardi. (2018). *Ke Depan Para Penerima PKH dan BPNT Di Kota Sukabumi Bisa Berkurang*. Sukabumi: Dinas Komunikasi dan Informatika. (<https://portal.sukabumikota.go.id/6810/ke-depan-para-penerima-pkh-dan-bpnt-di-kota-sukabumi-bisa-berkurang/>) diakses pada 5 Juni 2021.
- Haryati. (2020). *Penerapan Komunikasi Vertikal Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun*. Kabupaten Karimun: Universitas Karimun.
- Heri Herdiawanto Fokky. (2019). *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Hasan, Kamarudin. 2016. *Media Massa/Press dan Komunikasi*. Kamarudin. (2015). *Modul Komunikasi Sosial dan Pembangunan*. Muara Batu: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 248.
- Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muchri Rahma. (2009). *Komunikasi Pembangunan Dalam Perspektif Terkini*. Jurnal *Academica* Vol. 1 No. 2.
- Nasution. B, Anuar Rasyid. (2019). *Buku Ajar Komunikasi Sosial dan Pembangunan*. Pekanbaru: Penerbit Taman Karya
- Nasution, Z. (1988). *Komunikasi pembangunan: Pengenalan teori dan penerapannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, Zulkarimen. 2009. *Komunikasi Pembangunan. Pengenalan Teori dan Penerapannya - Ed. Revisi*. Jakarta. Rajawali Press.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Prof. Dr. Suryana, M.Si. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Program Keluarga Harapan. (2020). *Apa Itu Program PKH*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia. (<https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>) diakses pada tanggal 23 Juli 2021.
- Rep-Rilis Humas Pemkab Sukabumi, <https://jabarprov.go.id/index.php/news/29267/2018/08/08/MarwanHamami-TKSK-dan-Penyuluh-Sosial-Adalah-Sdm-Penyelenggara-Kesos> (diakses pada 29 Juni 2021)
- Rini Rinawati. (2005). *Komunikasi dan Pembangunan Partisipatif*. Bandung: Jurnal Universitas Islam Bandung.
- Sarinah. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Schramm, Wilbur. 1985. *The Process and Effect of Mass Communication*. New York: University Of Illinois Press
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 253
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm. 272.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm. 273.
- Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik: Edisi Revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta), 2006.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Kesejahteraan Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian*

- Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- Virdita Ratriani. (2021). PKH 2021 Berikut Syarat Kriteria dan Besar Bantuan Penerimaannya. Jakarta: Kontan. (<https://nasional.kontan.co.id/news/pkh-2021-berikut-syarat-kriteria-dan-besar-bantuan-penerimaannya>) diakses pada: 9 April 2021.
- W. Lawrence Newman. (2014). *Pearson New International Edition Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Pearson: Harlow